

**EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU BERBASIS KAWASAN KEMISKINAN
(PTBK2)
(Studi Pada Pembangunan Jamban Sehat Bagi Keluarga Miskin di Desa Kemuning Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo)**

Achmad Viqiananto

13040674104 S1 Administrasi Negara Administrasi Publik FISH Universitas Negeri Surabaya (viqiananto@gmail.com)

Indah Prabawati, S. Sos, M. Si.

00290774004 S1 Administrasi Negara Administrasi Publik FISH Universitas Negeri Surabaya
(prabawatiindah@yahoo.co.id)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program (PTBK2) Jamban sehat Di Desa Kemuning. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengenai evaluasi PTBK2 pembangunan jamban sehat di desa Kemuning kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn, yakni efektifitas, efisiensi, pemerataan kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Data primer diperoleh dari informan langsung yakni implementor dan kelompok sasaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, catatan, dokumentasi dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Pelaksanaan PTBK2 jamban sehat di Desa kemuning dapat mencapai tujuan meskipun masih terdapat kendala Belum sepenuhnya efektif karena masih ada anak anak yang belum beralih menggunakan jamban, tetapi manfaatnya dirasakan sepenuhnya oleh target grup. Pada kriteria efisiensi, program ini tidak didukung anggaran yang maksimal. Bahan material jamban dinilai bukan paling baik. Kriteria kecukupan belum tercapai sepenuhnya, anggaran karena anggaran yang terbatas. Kriteria pemerataan awalnya dinilai kurang terpenuhi, karena ada kelompok sasaran yang mengajukan kritik karena rumah tangganya yang dinilai memenuhi kriteria miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan program. Responsivitas kelompok sasaran dengan program PTBK2 jamban sehat ini dinilai sangat baik, karena banyak kelompok sasaran yang mau melibatkan diri mengikuti kegiatan.

Kata kunci: evaluasi, PTBK2, jamban sehat.

The purpose of this study is to describe the evaluation of the implementation of the program (PTBK2) Toilets healthy in Kemuning. This research is descriptive. The focus of this study is the evaluation of development PTBK2 healthy latrines in villages Kemuning, Tarik, Sidoarjo using Dunn evaluation criteria, effectiveness, efficiency, alignment sufficiency, responsiveness, and accuracy. The primary data obtained from informants direct the implementer and the target group, while secondary data obtained from books, records, and other documentation. Data was collected through interviews and documentation. Data analysis techniques, conducted with data reduction, data presentation and verification as well as the conclusion. Implementation PTBK2 healthy latrines in the Kemuning village can reach the goal even though there are still obstacles to be fully effective yet because there are still children who have not switched to using latrines, but the benefits are fully felt by the target group. On the criteria of efficiency, this program is not supported maximum budget. Materials latrine is not considered the most good. Sufficiency criteria have not been fully achieved, the budget because the budget is limited. Criteria alignment initially considered less fulfilled, because there are target groups that have criticized the household because they are considered to meet the criteria of the poor but do not get assistance program. The responsiveness of the target group with healthy latrines PTBK2 program is considered very good, because many target groups who want to involve themselves follow the activities.

Keywords: Evaluation, PTBK2 healthy latrines

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Mewujudkan tujuan masyarakat yang modern dan kehidupan yang lebih baik dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan harus terus dilakukan secara berkelanjutan, demi peningkatan kualitas hidup manusia (Siagian, 1994).

Menurut Grigg, dalam sosialisasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) Sidoarjo 2013, pembangunan infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Friedman dalam sosialisasi kebijakan Pronangkis Sidoarjo 2013, mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi asset (tanah, perumahan,

peralatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna serta hak-hak memperoleh kesehatan yang layak. Setiap individu membutuhkan kesamaan hak memperoleh kesempatan yang sama untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Rumah tangga miskin di Indonesia memiliki beberapa kriteria atau standar masing-masing daerah. Di Kabupaten Sidoarjo, ditinjau dari laporan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07) terdapat empat kriteria umum Rumah Tangga Sangat Miskin meliputi

1. Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana
2. Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
3. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
4. Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.

Berdasarkan kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang:

1. Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester
2. Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
3. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah
4. Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
5. Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m²/orang); Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. (Analisa Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Sidoarjo, 2014)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang di dalamnya terdapat Program Akselerasi yaitu Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2). Program ini adalah program yang terbentuk dari salah satu Sekretariat tetap pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo yang bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Salah satu aspek dari PTBK2 adalah pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria. Kelompok sasarannya adalah rumah tangga miskin pada beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo.

Program PTBK2 pembangunan jamban sehat ini adalah kebijakan bersifat *top-down* yang telah

berlangsung di beberapa wilayah di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo di antaranya adalah Desa Kemuning.

Fredrich yang dikutip oleh Wahab, (2008: 3) mendefinisikan kebijakan sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Salah satu bentuk dari kebijakan publik yang diimplementasikan dalam bentuk program oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo adalah Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan terutama pada kebersihan dalam mengelola limbah rumah tangga. Yaitu pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin.

Terkait dengan pemecahan masalah kemiskinan maka pemerintah Sidoarjo telah menerapkan Program Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2). Program ini dikelola oleh Bappeda dan dilakukan pembinaan langsung oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Sebagai pelaksanaannya adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo. Program ini diharapkan mengatasi permasalahan kemiskinan dengan melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Pembangunan jamban sehat dalam program PTBK2 ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sanitasi dan mempercepat pembangunan pada masyarakat miskin.

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang telah ditentukan. (Muhadjir dalam Widodo, 2006: 112)

Menurut William N. Dunn terdapat tiga pendekatan evaluasi. Diantaranya

a. Evaluasi semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Tanpa menambahkan manfaat atau nilai dari hasil-hasil suatu kebijakan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

b. Evaluasi formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil dari suatu kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan pelaksana atau administrator program.

c. Evaluasi keputusan teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan

valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Menurut Palumbo Dalam Parsons menyebutkan ada dua tipe evaluasi kebijakan, yaitu:

a. Evaluasi formatif

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan.

b. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika program hampir berakhir atau telah berakhir.

Menurut Wibawa oleh Subarsono (2008:120), dimana tujuan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Evaluasi mempunyai karakteristik menurut Dunn (2003:608-609) yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Tipe Evaluasi menurut James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama : Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua: Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Tipe ketiga: Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan diperlukan kriteria kriteria yang dapat digunakan sebagai saran dalam pemecahan masalah kebijakan.berikut ini merupakan enam tipe kriteria yang telah diungkapkan oleh Dunn (1999:610)

a. Efektifitas (*effectiveness*)

Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanannya.

b. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Kecukupan

Tipe ini berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d. Perataan (*equity*)

Tipe ini memiliki hubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan, baik biaya atau manfaat yang didistribusikan secara adil.

e. Responsivitas (*responsiveness*)

Tipe ini berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria ini berhubungan erat dengan substansi yang rasional. Karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria secara bersama sama.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data dikerjakan data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung. Metode ini berusaha mendeskripsikan tentang evaluasi Program Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) yakni dalam pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin secara terperinci. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka peneliti akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

Penelitian ini dilakukan di desa Kemuning kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu desa selain Desa Krembung Kecamatan Krembung yang mendapat bantuan Program. Beberapa penduduk Desa Kemuning memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin yang menjadi sasaran Program Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) khususnya rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi pembuangan kotoran atau jamban, Hal ini perlu diadakan sebuah kajian yang mendalam tentang evaluasi PTBK2 pembangunan jamban sehat di desa Kemuning kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Fokus penelitian ini adalah mengenai evaluasi PTBK2 pembangunan jamban sehat di desa Kemuning kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi program tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor penilaian dalam evaluasi program tersebut adalah

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Kriteria ini mencakup :

- a. Manfaat yang dirasakan kelompok sasaran
- b. Hasil yang didapatkan dari program

2. Efisiensi (*efficiency*)

Program terdiri dari beberapa proyek kerja dan memberikan arahan tentang tujuan yang ingin dicapai serta persoalan yang perlu dipecahkan. Sementara proyek berupa kesatuan tugas yang berjangka waktu lebih pendek terdiri dari beberapa tugas yang memiliki sasaran, jadwal serta anggaran tertentu. Kriteria ini mencakup perbandingan

- a. Seberapa besar usaha yang dilakukan dalam melaksanakan program
- b. Anggaran yang digunakan untuk program
- c. Waktu yang dihabiskan selama pelaksanaan program

3. Kecukupan

Dalam mengevaluasi kebijakan, perlu melihat sudah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Kebijakan atau program dibuat untuk membantu memecahkan masalah publik. Kriteria ini mencakup :

- a. Pemecahan masalah yang terjadi
- b. Pemenuhan seluruh kebutuhan sanitasi oleh program

4. Perataan (*equity*)

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi misalnya rasio biaya dan laba mungkin lebih unggul dibanding program-program lain namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Kriteria ini mencakup :

- a. Keadilan dalam pemberian bantuan program
- b. Keuntungan yang didapatkan

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Sebuah kebijakan yang berhasil tampak melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Kriteria ini mencakup :

- a. Tingkat antusiasme kelompok sasaran
- b. Diterima dan ditolaknya program yang diberikan

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ini mencakup :

- a. Kesesuaian kebutuhan kelompok sasaran dengan apa yang diberikan program
- b. Kesesuaian tujuan awal program dan hasil yang didapatkan

Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kasubbag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Bapak Ardi Anindita, S.STP juga sebagai anggota TKPKD Kab Sidoarjo, Bapak Joko Perangkat Desa Kemuning dan warga Desa Kemuning diantaranya Bapak Jiman warga RT 16, Bapak Karnoto RT 16 dan Bapak Sukadi RT 15 sebagai *target group*.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain: catatan, buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan kepada sejumlah informan. Wawancara tak terstruktur atau terbuka identik dengan wawancara bebas, sifatnya hanya membimbing dan membantu dalam proses wawancara. Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subjek atau informan secara bebas. Pandangan, pendapat, sikap dan keyakinan informan yang diwawancarai tidak banyak dipengaruhi pewawancara dan biasanya berlangsung secara informal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti autentik yang akan memberikan kekuatan nyata dan empiris tentang data yang diperoleh.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong 2006:4) mendefinisikan "metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti

melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda Tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda Tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota)

Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mana badan ini merupakan Badan Staf yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

a. Visi :

“Terwujudnya perencanaan yang sinergis dan berkelanjutan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang dilandasi sikap profesionalisme”.

Yakni Bappekab Sidoarjo yang mampu secara profesional memfasilitasi dan mengakomodir berbagai kebijakan; program dan kegiatan pembangunan dari para stakeholders, sehingga antar program dan kegiatan pembangunan saling memperkuat; selaras, sinkron dan memberikan landasan yang mantap bagi pembangunan selanjutnya, serta mempunyai peran sebagai arah/pedoman, pendorong, penggerak utama, inisiator dan inovator pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif.

b. Misi :

“Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui: analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

e. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
3. Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Pemerintahan dan aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur;
3. Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang Pemerintahan dan Aparatur;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
3. Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Bidang Permukiman Dan Prasarana Wilayah

Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;
3. Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

k. Bidang Statistik dan Pelaporan

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang statistik dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis statistik dan pelaporan;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis statistik dan laporan;
3. Pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan data statistik daerah;
5. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Penyusunan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran.

Tujuan dibentuknya TKPK yaitu untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di daerah secara terpadu, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan sehingga program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.



Gambar 1.1 Lambang TKPKD

a. Dasar Hukum

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur

kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010.

b. Tugas dan Tanggung jawab

TKPKD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

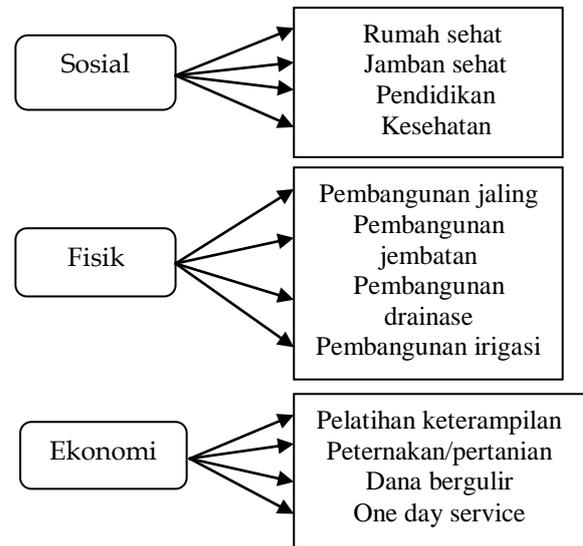
c. Keanggotaan

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

Berdasarkan data monografi Kemuning tahun 2010, dan Keterangan Bapak Joko Perangkat Desa Kemuning, dapat digambarkan sebagai berikut: Kecamatan Tarik merupakan kecamatan yang terletak pada barat daya pusat kota Sidoarjo, berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto. Desa kemuning adalah desa yang paling utara dari Kecamatan Tarik. Luas desa Kemuning 263,250 hektar, sebelah utara berbatasan dengan Desa Segodo Bncang Kecamatan Balongbendo, selatan Desa Tarik, sebelah Timur, Desa Banjar Wungu, sebelah Barat Desa Mindugading, Kecamatan Tarik. Jarak dengan Pemerintahan pusat Kabupaten Sidoarjo 27 Km.

Wilayah ini mendapat prioritas pembangunan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan. Bisa dikatakan distribusi kebijakan dari waktu sebelumnya kurang berjalan baik hingga sampai ke pelosok Kabupaten seperti Kecamatan Tarik. Kecamatan Tarik menjadi prioritas utama Pembangunan sejak tahun 2005 karena dikhawatirkan pelosok kabupaten akan mengalami keterlambatan atau ketertinggalan pembangunan. Distribusi kebijakan harus segera diberlakukan dengan rata agar tidak terjadi kesenjangan.

PTBK2 atau Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan merupakan program aksi pembangunan secara terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 terhadap lokasi atau wilayah sasaran tertentu berbasis data dengan peringkat kemiskinan tertinggi dengan harapan intervensi-intervensi kebijakan yang meliputi kelompok-kelompok indikator program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan status ekonomi dan sebagai bentuk proses Pembelajaran sosial masyarakat secara berkelanjutan. (Bappeda, 2013)



Bagan 1.1 Kluster Program PTBK2

Bagan diatas menjelaskan bahwa Program Jamban Sehat merupakan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berbasis Data PPLS 2011 melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2). Program ini dikategorikan masuk dalam Kluster 1 yaitu bantuan sosial terpadu berbasis keluarga atau individu dan langsung diterimakan kepada masing-masing rumah tangga sasaran yang telah ditentukan sesuai persyaratan kondisi fisik tempat tinggal dari aspek akses sanitasi. Pada aspek jamban sehat ini terdapat tujuan Mengurangi lingkungan kurang sehat karena pengelolaan sanitasi yang salah, mengurangi beban ekonomis keluarga miskin dan gotong royong .

Tahap pelaksanaan rahun pertama dimulai dengan pemilihan program yang tepat dalam hal ini jamban sehat bagi keluarga miskin di Desa Kemuning dan dilanjutkan dengan survey lokasi. Setelah survey selesai dan data sudah diverifikasi, maka tiba saat eksekusi. Yakni terbangun 181 unit jamban di Desa Kemuning pada rumah tangga miskin pada tahun pertama, yang rencananya akan berlanjut pada periode kedua dan ketiga. Periode pertama berlangsung dari 2013-2015.

Dalam program ini terdapat beberapa kreatifitas lokal dan inovasi diantaranya:

- a) Perbaiki rumah keluarga miskin dari tidak layak menjadi layak huni.
- b) Peningkatan kualitas kesehatan bagi rumah tangga miskin
- c) Perbaiki kualitas kenyamanan dan keamanan bagi rumah tangga miskin

Terkait dengan pentingnya kesehatan masyarakat, pembangunan jamban sangatlah penting untuk mengelola sanitasi. Masih banyak masyarakat di Desa Kemuning yang membuang hajat/kotoran di sungai dan di pelataran perkebunan. Di pinggir sungai masih banyak terdapat

tempat pembuangan kotoran seadanya yang biasanya ditutupi karung bekas/terpal. Di pelataran perkebunan juga masih dijumpai banyak kotoran manusia. Beberapa hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas kesehatan pada masyarakat. (Sosialisasi PTBK2).

Pembangunan jamban sehat di Desa Kemuning telah berjalan selama 2 periode sejak 2013. Dan telah dibangun sebanyak 180 unit jamban bagi rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria. Program ini melibatkan pemerintah desa setempat, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai perumus kebijakan dan sebagai pengawas serta pengevaluasi program. Sekarang sebagian besar warga yang tergolong rumah tangga miskin yang memiliki jamban sehat. Tetapi ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor mengapa penting untuk dilakukan evaluasi.

Tujuan pokok awal program ini adalah meringankan beban ekonomis masyarakat miskin, meningkatkan kebersihan dan kesehatan dalam pengelolaan sanitasi sehingga indeks pembangunan manusia di Desa Kemuning dapat meningkat. Maka dari itulah evaluasi dirasa penting dalam kelanjutan program ini dan untuk mengukur pencapaiannya. Hasil yang telah didapat di lapangan dalam penelitian yang dilakukan secara intensif maka peneliti mendapat data dengan menggunakan fokus penelitian sebagai konsep penulisan dan penyajian data yakni enam kriteria evaluasi menurut Dunn.

a. Efektifitas

Pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin di Desa Kemuning dalam Program PTBK2 ini belum sepenuhnya efektif, namun sebelum ada pembangunan jamban ini, buruknya pengelolaan sanitasi oleh warga desa kemuning yang belum memiliki jamban. Pada saat itu warga yang tidak punya jamban membuang hajat di sungai, dengan penutup seadanya yang dinilai kurang etis apabila terlihat orang lain. Selain di sungai di pelataran kebun dan sawah pun kerap dijumpai kotoran manusia.

Setelah ada program ini warga desa Kemuning sudah lebih menjaga kebersihan dengan tidak membuang hajat sembarangan. Warga sudah bisa memakai jamban bantuan dari pemerintah ini dan warga yang buang air di pinggir sungai dan pelataran kebun sudah berkurang secara signifikan hal ini dibuktikan dengan berkurangnya bak bak atau toilet bertutup terpal di pinggir sungai dan berkurangnya kotoran di pelataran kebun dan sawah.

b. Efisiensi

Mengenai apa saja usaha dan berapa nilai materi yang digunakan dalam pembangunan program ini dirasa belum cukup memenuhi kriteria efisiensi. Sebab, masih ditemukan beberapa kendala mengenai kualitas program pembangunan jamban sehat dalam PTBK2 di Desa Kemuning ini.

Beberapa masyarakat penerima program, atau kelompok sasaran mengeluhkan kualitas material bangunan jamban khususnya pada bahan material *septic tank* yang diberikan. Terdapat beberapa kritik yang mengarah kepada kelayakan bahan yang dipakai pada pelaksanaan program pembangunan jamban

sehat pada PTBK2 ini. Prangkat desa kurang mengetahui soal kualitas bahan karena mereka hanya menerima bahan material tersebut dalam keadaan sudah jadi atau barang jadi.

c. Responsifitas

Respon kelompok sasaran pada saat implementasi program pembangunan jamban sehat PTBK2 cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan warga dapat menerima semua kebijakan dari pemerintah meskipun ada beberapa hal yang kurang disetujui.

Selain itu, kelompok sasaran juga membantu para tukang yang ditugaskan oleh dinas PU Cipta Karya untuk membangun jamban di rumahnya. Warga dapat menerima sebuah kebijakan tetapi tetap dengan persetujuan pihak-pihak terkait.

d. Perataan

Periode pertama program PTBK2 ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi menunjukkan sebagian besar kriteria terpenuhi dengan baik meski ada beberapa kendala. Kriteria perataan ini menyangkut keadilan dalam memberikan bantuan program kepada kelompok sasaran. Ini adalah hal yang harus dilakukan secara intensif agar tidak menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial. Jika terdapat kesalahan, maka implementor program akan dianggap sebagai abdi negara yang gagal dalam menngentaskan kemiskinan.

Tidak semua rumah tangga miskin mendapat bantuan program pembangunan jamban sehat PTBK2. Keluarga yang dinilai sesuai standar yang ditentukan terdapat tiga desil keluarga miskin. Desil pertama itulah yang mendapatkan bantuan program ini. Desil pertama ini dianggap paling tidak mampu.

e. Kecukupan

Kebutuhan sanitasi adalah hal pokok bagi setiap keluarga, program bantuan pembangunan jamban sehat PTBK2 ini dirasa sudah memenuhi kriteria kecukupan. Memang jamban saja sudah cukup memenuhi kebutuhan akan sanitasi sebuah keluarga, jika bicara soal sanitasi saja tanpa tambahan dinding pembatas jamban hal ini akan menjadi ketidakcukupan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tidak semua warga yang mendapat bantuan program pembangunan jamban sehat ini dibangun jamban di dalam kamar mandinya masing masing. Tetapi dibangun jamban di area di luar rumahnya seperti pada belakang rumah atau kebun, dengan alasan kamar mandinya terlalu sempit apabila dibangun jamban. Tergantung letak, luas, dan keadaan kamar mandi sebuah rumah kelompok sasaran.

f. Ketepatan

Bappeda khususnya TKPKD memiliki strategi tersendiri untuk menjadikan program ini adalah program yang paling tepat dengan konsep demikian yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Desa Kemuning Kecamatan Tarik ini.

Program ini dinilai tepat untuk warga miskin di Desa Kemuning sebagai kelompok sasaran,

disamping kebutuhan lainnya memang kebutuhan sanitasi inilah yang juga dibutuhkan atau terbilang penting bagi warga yang menerima bantuan program. Untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari dengan layak.

Pembahasan

Kebijakan publik merupakan keputusan atas apa yang dilakukan pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah publik Program PTBK2 ini merupakan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah yaitu Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan harapan dapat mengatasi masalah publik yang berkenaan dengan kemiskinan dengan memberikan program yang tepat dan dapat diterima dengan baik. Pemberian program ini memungkinkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan membiarkan terjadinya kebijakan dengan sistem yang dibentuk sebagai kebijakan publik.

Data di lapangan menunjukkan perbandingan yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan teori para ahli, sehingga konsep tersebut baik digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini. Unsur-unsur kebijakan yang terdapat di dalamnya adalah program PTBK2 yang terwujud dalam pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin. Program ini bertujuan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya dalam aspek sanitasi rumah tangga. Juga mengenai kesehatan, kebersihan lingkungan sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai perumus kebijakan program PTBK2, yang membentuk Tim yaitu TKPKD. TKPKD sebagai implementor program PTBK2 yang berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan juga dinas terkait seperti dinas PU dan BPS kabupaten Sidoarjo berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/170/404.1.3.2/2015 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 dan SK Bupati No. 188/637/ 404.1.3.2/2009 tentang Bantuan Rehab Rumah Keluarga Miskin Kabupaten Sidoarjo Kelompok sasarannya adalah rumah tangga miskin di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya Desa Kemuning Kecamatan Tarik, selain itu terdapat desa lain sebagai kelompok sasaran yaitu Desa Krembung Kecamatan Krembung.

Evaluasi program PTBK2 jamban sehat di Desa kemuning penting dilakukan karena sebuah program atau kebijakan membutuhkan jawaban atas apa saja yang telah dicapai atau apa saja pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pemenuhan kebutuhan umpan balik yang akan dijadikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang akan datang. Evaluasi ini juga akan membuktikan gejala-gejala atau fenomena dan juga permasalahan yang timbul pada kenyataannya.

Enam kriteria evaluasi menurut Dunn akan mengupas hasil dari penelitian ini sebagai pisau analisis untuk

merelevansikan gejala yang terjadi pada realitas, termasuk membuktikan gejala, fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa yang ada pada konsep setiap indikator kriteria evaluasi tersebut.

1. Indikator Efektifitas

Sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan, bahwa pada indikator ini bisa dikatakan cukup terpenuhi. Melihat adanya perubahan kebiasaan target grup sebagai penerima kebijakan program PTBK2 jamban sehat di Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, awalnya rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria tidak memiliki sanitasi yang baik atau jamban. Kemudian berubah setelah adanya program PTBK2 jamban sehat bagi rumah tangga miskin ini mereka beralih kepada jamban yang telah diberikan pada saat membuang air.

Manfaat yang dirasakan target grup juga sudah cukup banyak. Dengan terbangunnya program ini mereka bisa menjalankan hidup sehari-hari mereka dengan baik khususnya dalam hal sanitasi. Jamban yang didapatkan sebagai bantuan program digunakan sebaik-baiknya oleh kelompok sasaran dan menimbulkan manfaat yang cukup dirasakan. Selain itu manfaat ekonomi juga terbilang sangat meringankan beban warga. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun jamban di rumah mereka sendiri. Dengan ini, dari segi ekonomi juga dapat dikatakan sudah efektif.

2. Indikator Efisiensi

Data di lapangan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan teori kriteria penilaian efisiensi. Dengan adanya permasalahan pada kualitas material program PTBK2. Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Program PTBK2 jamban sehat di Desa Kemuning ini belum sepenuhnya bisa dikatakan efisien. Karena beberapa hal menyangkut usaha yang dilakukan sudah maksimal tetapi masih ada kekurangan dalam bentuk material.

Data menunjukkan sumberdaya yang ada adalah anggaran dan pekerja bangunan untuk membangun jamban di setiap rumah kelompok sasaran sudah maksimal. Berbicara soal anggaran, data penelitian sangat terbatas, sehingga kita tidak dapat menyimpulkan masalah efisiensi soal anggaran dan hasil yang didapatkan, tetapi jika berbicara masalah usaha yang dilakukan kata efisiensi belum cukup

terpenuhi. Adanya permasalahan warga yang komplain bahwa material jamban sehat kurang bagus ini menjadi perhitungan bahwa efisiensi belum sepenuhnya terpenuhi. Kelompok sasaran menyangkan jika program sebegini tidak dilaksanakan secara maksimal.

3. Indikator Responsifitas

Data menunjukkan adanya perbedaan antara indikator-indikator penilaian dalam kriteria kecukupan. Pada fenomena yang terjadi di lapangan memang kurangnya pemenuhan kriteria ini cukup terlihat seperti kurangnya material pembangunan jamban sehat PTBK2. Namun pada dasarnya kriteria ini sudah cukup terpenuhi khususnya dalam hal pemecahan masalah lingkungan.

Dalam mengevaluasi kebijakan, perlu melihat sudah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Kebijakan atau program dibuat untuk membantu memecahkan masalah publik dan memenuhi kebutuhan. Program harus dapat meringankan masalah di lingkungan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak lagi terhambat. Karenanya, pelaksana kebijakan juga mesti tahu apa yang dihadapi masyarakat sehingga tidak salah memberikan pemecahan masalah. Ini berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Indikator Perataan

Faktor biaya dan manfaat adalah dua hal dalam mengukur tingkat pemerataan terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Pembiayaan yang dibagikan dengan merata kepada kelompok masyarakat harus sesuai dengan anggaran yang telah disediakan sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan manfaatnya bersama. Terdapat perbedaan atau kurangnya kesesuaian yang menyebabkan kurang terpenuhi antara teori para ahli pada kriteria ini dengan apa yang terjadi di lapangan.

Data menunjukkan bahwa anggaran program telah seluruhnya dilimpahkan kepada kelompok sasaran yakni rumah tangga miskin di Desa Kemuning dalam bentuk bangunan jamban lengkap dengan septic tank nya. Mereka berpendapat bahwa pendistribusian kebijakan hingga material sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Seluruh kelompok sasaran pada periode pertama program PTBK2 jamban sehat telah menerima dan merasakan bantuan program.

5. Indikator Kecukupan

Data yang menunjukkan bahwa responsivitas warga atau kelompok sasaran kebijakan program

PTBK2 jamban sehat cukup baik adalah sedikitnya gejala yang terjadi pada kelompok sasaran. Dalam kriteria ini tidak terdapat perbedaan dengan teori para ahli atau dengan kata lain sudah sesuai. Penolakan terhadap program ini pun relatif tidak ada, karena mereka mengerti bahwa program ini kedepannya akan menjadi manfaat dan berdampak baik bagi kelangsungan hidup sehari-hari kelompok sasaran. Ditambah dengan warga yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan program dari mulai sosialisasi awal hingga evaluasi dilakukan.

Kriteria responsivitas ini bisa dikatakan terpenuhi dengan baik, jika melihat data yang didapat tentang apa saja tindakan kelompok sasaran pada saat program berlangsung. Antusiasme dapat dijumpai dari beberapa individu dari kelompok sasaran seperti membantu tukang bangunan yang sedang membangun jamban di rumahnya. Atau anak dan istrinya yang setiap hari membuat makan siang, kopi, minuman atau sekedar makanan kecil untuk tukang yang sedang bekerja membangun jamban di rumah mereka. Mereka berpendapat bahwa program yang diberikan pemerintah ini akan menjadikan beban ekonomi mereka ringan, membangun jamban sendiri tanpa memerlukan biaya yang besar dan juga kedepannya akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari rumah tangganya.

6. Indikator Ketepatan

Ketepatan pada data yang didapatkan pada penelitian ini adalah menyangkut dua pokok bahasan yang pertama, sesuai dengan konsep indikator yakni program PTBK2 jamban sehat di Desa Kemuning telah berjalan dengan baik, artinya sebagian besar tujuan awal yang telah ditentukan telah dipenuhi. Adanya program ini adalah tepat bagi rumah tangga miskin yang membutuhkan kualitas infrastruktur dalam rumah mereka yaitu sanitasi atau jamban yang baik. Dengan demikian tujuan program dapat terpenuhi. Kedua adalah, tentang ketepatan program yang didistribusikan kepada siapa. Dalam hal ini adalah rumah tangga miskin yang telah memenuhi kriteria kemiskinan yang telah ditentukan dan telah disepakati dalam verifikasi data penerima bantuan program oleh aparat desa setempat dan TKPKD selaku pelaksana program PTBK2 jamban sehat dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat saran yang dapat diungkapkan peneliti. Saran tersebut adalah sebaiknya program ini didukung oleh anggaran yang cukup. Program akan jauh lebih baik kualitasnya

khususnya pada material bangunan jamban apabila anggarannya juga maksimal.

Selain itu, sosialisasi mengenai program sebaiknya dilakukan secara berkala, bukan hanya pada saat awal program. Hal ini untuk mengatasi ketidak tahuan kelompok sasaran, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak-anak agar tidak lagi membuang air di sembarang tempat dan beralih ke jamban yang sudah ada dan mengenai program yang sedang berjalan. Juga meminimalisir adanya gejala-gejala yang timbul.

Sebaiknya dilakukan pengawasan dan pengarahan kepada warga atau kelompok sasaran mengenai bahaya kerusakan material agar tidak terjadi sehingga warga bisa menjaga dengan baik, serta melakukan perawatan secara pribadi.

William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal internasional “Kebijakan Sektor Air dan Sanitasi: Studi kasus Evaluasi
- Miles B Matthew & Huberman, A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan oleh tjetjep Rohand Rohidi*. Universitas Indonesia (UI Perss) : Jakarta.
- Moleong, J. Lexi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Monografi Desa Kemuning, 2010
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Program Air Minum, Sanitasi dan *Hygiene Intervensi* di Pedesaan Maharashtra, India
- Sosialisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo. 2013
- Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan. 2007 (SPDKP07)
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Konsep dan Aplikasi : Analisis Proses*. Malang: Banya Media Publishing.